



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN PASER

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

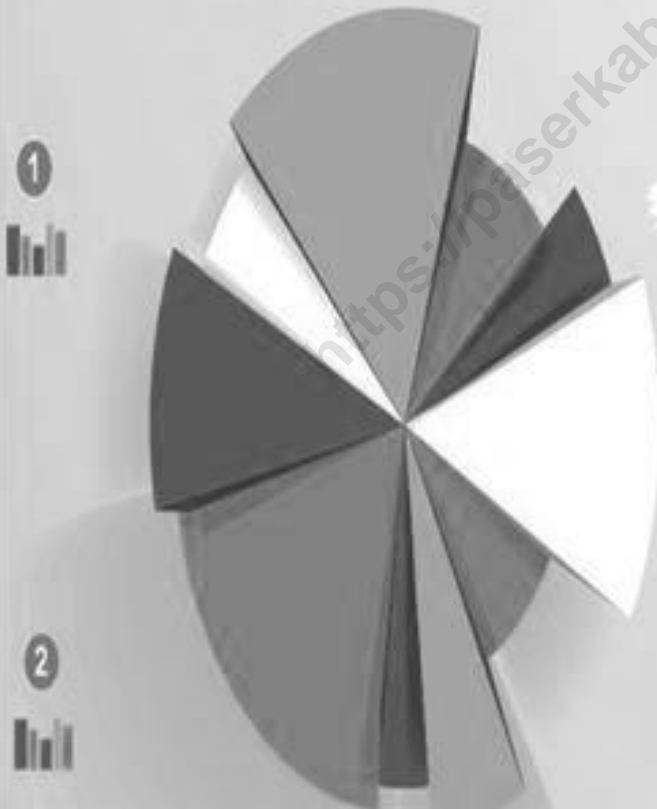
Katalog BPS : 4102002.6401



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN PASER

2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PASER

TAHUN 2017

No. Katalog	:	4102002.6401
No. Publikasi	:	64.015.17.16
Ukuran buku	:	21 cm x 28 cm
Jumlah halaman	:	ix+ 54 halaman
Naskah	:	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser
Penyunting	:	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser
Gambar Kulit	:	Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser
Diterbitkan oleh	:	Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

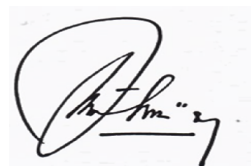
KATA PENGANTAR

Penerbitan publikasi “ *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Paser Tahun 2017*” dimaksudkan untuk memantau perkembangan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Paser dalam beberapa kurun waktu terakhir. Terjadi perubahan metode perhitungan dalam menghitung angka IPM, muatan yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa indikator tunggal sebagai pembentuk indikator komposit IPM. Indikator-indikator IPM dengan menggunakan metode perhitungan baru meliputi indikator angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan angka paritas daya beli (kemampuan daya beli) masyarakat.

Penyusunan publikasi ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser. Harapan kami, semoga apa yang kami sajikan dalam publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pihak pemerintah daerah Kabupaten Paser di dalam melakukan evaluasi pembangunan dan penyusunan program-program pembangunan di masa mendatang.

Penghargaan tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini. Selanjutnya, kritik dan saran bagi perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Tana Paser, September 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Paser,



Ir. Bahramsyah

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Pengertian Indikator	6
2.2. Indikator-Indikator Pembangunan Manusia	7
2.3. Metode Penghitungan IPM	12
2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM	15
2.5. Ukuran Perkembangan IPM	17
2.6. Definisi Indikator Operasional Terpilih	17
BAB III GAMBARAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN PASER	21
3.1. Bidang Kependudukan	21
3.1.1. Pertumbuhan Penduduk	21
3.1.2. Persebaran Penduduk	22
3.2. Bidang Kesehatan	23
3.2.1. Pelayanan Kesehatan	24
3.2.2. Kesehatan Lingkungan	26
3.2.3. Derajat Kesehatan	33

	Halaman
3.3. Bidang Pendidikan	35
3.3.1. Fasilitas Pendidikan	35
3.3.2. Partisipasi Pendidikan Sekolah	36
3.3.3. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	37
3.3.4. Angka Harapan Lama Sekolah.....	38
3.3.5. Rata – rata Lama Sekolah	39
3.4. Pengeluaran Perkapita per tahun.....	40
BAB IV TREND INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PASER ...	43
LAMPIRAN.....	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
3.1. Jumlah Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan di Kabupaten Paser, Tahun 2012 – 2016	25
3.2. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Paser, 2016.....	28
3.3. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Paser, Tahun 2016	29
3.4. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Paser, 2016.....	29
3.5. Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Paser, 2016.....	30
3.6. Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kabupaten Paser, 2016.....	31
3.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/ Kotoran/ Tinja di Kabupaten Paser, Tahun 2016	32
3.8. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Kabupaten Paser, Tahun 2016.....	32
3.9. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2016.....	33
3.10. Persentase Penduduk Kabupaten Paser Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan, Tahun 2016	37
3.11. Angka Harapan Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Paser, 2010 – 2016	38

3.12.	Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk 25 Tahun Ke Atas di Kabupaten Paser, 2010 – 2016.....	40
3.13.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per tahun yang disesuaikan (000) Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2016.....	40
4.1.	Perkembangan IPM Kabupaten Paser Tahun 2010– 2016.....	43
4.2.	Pertumbuhan IPM Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2016.....	44

<https://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil.....	11
3.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Paser, Tahun 2012 – 2016.....	22
3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2012-2016	23
3.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Paser, Tahun 2016.....	25
3.4. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Paser menurut Jenis dirinci Perkecamatan Kabupaten Paser, Tahun 2016.....	26
3.5. Perkembangan Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2010 – 2016.....	34
3.6. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012 – 2016.....	36
3.7. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Paser Menurut Kelompok Umur Jenjang Pendidikan Tahun 2010 – 2016.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Shared Kelompok Komoditas dalam Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP).....	46
2. Komoditas Terpilih pada Metode Baru dalam Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP).....	47
3. Angka Harapan Hidup Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 - 2016.....	48
4. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2016.....	49
5. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2016.....	50
6. Pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2016.....	51
7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2016.....	52
8. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2016.....	53
9. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2016.....	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

“Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.”

Dimensi pembangunan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan mental/karakter.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industry.
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah.

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Dalam konteks Kabupaten Paser, pembangunan manusia tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Dengan misinya, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi dan Pemukiman;
2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;

3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan;
5. Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat Lokal.

Prioritas Pembangunan daerah berturut-turut meliputi: Infrastruktur jalan dan jembatan, Pendidikan, Kesehatan, Listrik, Air Bersih, Rumah Layak Huni, dan Pertanian dalam arti luas.

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*United Nation Development Programme – UNDP*).

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada

umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah, akan memerlukan data statistik sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Paser, khususnya terkait dengan masalah pembangunan manusia. Oleh karena itu penerbitan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipandang perlu sebagai sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia di Kabupaten Paser. Selain itu, dengan adanya publikasi tersebut diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Secara umum maksud penyusunan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser Tahun 2017 antara lain bertujuan:

- a. Menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Paser yang dilengkapi dengan indikator-indikator relevan.
- b. Sebagai dasar perencanaan pada tingkat makro, terutama terkait dengan masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c. Menyediakan pembahasan mengenai keterkaitan pembangunan manusia dengan dimensi lain pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan anggaran, terutama terkait dengan kebijakan alokasi bagi pelayanan publik untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

- e. Dan, secara umum memberikan informasi mengenai perkembangan Indeks pembangunan manusia (IPM) dari tahun ketahun serta perkembangan metode yang digunakannya untuk menunjang kebutuhan *stakeholder* disegala lapisan masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Perencanaan bagi program-program pelaksanaan pembangunan memerlukan informasi yang dapat menyajikan gambaran sebenarnya di lapangan (*represent reality*). Semua informasi yang ada tersebut berguna sebagai penunjang bagi analisis, monitoring dan evaluasi suatu kebijakan. Dari sini dapat dilihat pentingnya pemanfaatan data yang relevan dengan kualitas yang baik dan dari sumber yang terpercaya dikarenakan kecermatan dan konsistensi data sangat diperlukan untuk mencegah kekeliruan kesimpulan yang dapat terjadi di kemudian hari secara dini.

Ruang lingkup penyusunan buku “**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser Tahun 2017**” ini adalah mencakup berbagai isu utama pembangunan manusia, dengan rentang isu yang dibahas mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Sumber data yang digunakan dalam analisis ini antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2010 s.d. 2016, serta data lain yang dikumpulkan dari berbagai dinas/instansi yang ada kaitannya dengan penyusunan buku ini.

BAB 2

METODOLOGI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM di suatu wilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu 100. Dengan kata lain, reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal.

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metode Baru). Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. **Angka Melek Huruf (AMH)** sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
2. **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

3. Penggunaan rumus **rata-rata aritmatik** dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

2.1. Pengertian Indikator

Indikator merupakan Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- (1) sah (*valid*), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut;
- (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda;
- (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator;
- (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud.

Dalam hal ini, indikator dibedakan menjadi 2 yaitu: indikator bersifat tunggal (indikator tunggal) dimana isinya hanya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB), dan Indikator bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator,

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

- (a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.

- (b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.
- (c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SLTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain.

2.2. Indikator-Indikator Pembangunan Manusia

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup *up to date* dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olahraga, dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan

pada satu wilayah yaitu kesederhanaannya di dalam proses penghitungannya. Disamping itu juga, data yang digunakan untuk menghitung IMH ini pada umumnya sudah banyak tersedia.

Dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan pembangunan yang ada, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan. Untuk itu diperlukan indikator lain yang lebih representatif dengan tuntutan permasalahan yang berkembang. Dalam hal ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; Human Development Index) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *Purchasing Power Parityindex* (PPP). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH.

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Untuk mengukur usia hidup, BPS menggunakan ukuran atau indikator angka harapan hidup waktu lahir atau *life expectancy at birth (AHH)*. Tampaknya tidak ada yang meragukan AHH sebagai ukuran usia hidup. Yang perlu dicatat adalah bahwa disperspektif konsep pembangunan manusia yang ingin diukur sebenarnya tidak hanya dari segi usia panjang sebagaimana terefleksikan dalam AHH, tetapi juga segi “sehat”. Tetapi yang terakhir ini sulit dioperasionalkan. Selain itu, karena UNDP juga menggunakan AHH sebagai IPM global maka angkanya dapat dibandingkan secara internasional.

Angka AHH yang digunakan untuk menghitung dan menganalisis IPM Tahun 2016 bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016 KOR. Penghitungan dilakukan berdasarkan dua (2) data dasar, yaitu rata-rata ALH (anak lahir hidup) dan rata-rata AMH (anak masih hidup) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Penghitungan AHH dilakukan dengan metode tidak langsung (*indirect technique*). Pada Komponen Angka Harapan Hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS/ EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

Untuk mengukur dimensi pengetahuan, BPS menggunakan 2 (dua) indikator yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak lahir. Proses Penghitungannya dengan perbandingan bobot 1 untuk HLS dan 1 untuk RLS. Pada metode sebelumnya, HLS tidak dipergunakan dan masih menggunakan variabel angka melek huruf. Namun angka melek huruf sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Sehingga BPS mengganti ukuran melek huruf dengan ukuran harapan lama sekolah. Alasan penggantian tersebut ialah mengikuti standar UNDP. UNDP telah menggunakan metode baru sejak tahun 2010 dan disempurnakan tahun 2011. Selain itu angka melek huruf sudah sangat tinggi untuk semua wilayah. sebenarnya tidak lagi menggunakan RLS sebagai komponen IPM dan diganti dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), tetapi alasan yang dikemukakan adalah pengumpulan data secara internasional, bukan alasan substansial. Secara substansial RLS yang merupakan indikator dampak diakui lebih unggul dari APS yang merupakan indikator proses sebagai komponen IPM. Karena

alasan itu BPS tetap menggunakan RLS sebagai komponen IPM. Sumber data yang digunakan untuk menghitung HLS dan RLS adalah SUSENAS 2016 KOR.

3. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (atau mudahnya daya beli), Dalam cakupan lebih luas Standar Hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Dalam pengaplikasian metode perhitungan IPM yang baru UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan *GNP_{adjusted}* atau disebut PNB (produk nasional bruto) perkapita. Penggantian variable PDB menjadi PNB dengan alasan PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat disuatu wilayah. Untuk keperluan penghitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota), BPS tidak menggunakan produk nasional bruto yang kira-kira setara dengan ukuran yang digunakan UNDP. Alasannya karena hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan *concern* IPM. Sebagai penggantinya, BPS menggunakan indikator dasar rata-rata pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat riil dengan tahun dasar 2012=100.

$$\bar{Y}'_t = \frac{\bar{Y}_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan :

\bar{Y}'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

\bar{Y}_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

Penghitungan indikator dasar rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan sedemikian rupa untuk menjamin keterbandingan antar waktu dan daerah di Indonesia.

Sehubungan dengan belum tersedianya data IHK (Indeks harga Konsumen) Kabupaten Paser dan untuk keperluan perbandingan nilai IPM Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, maka dalam penghitungan paritas daya beli digunakan IHK Kota Jakarta Selatan. IHK sementara ini hanya dihitung di 54 kota di seluruh Indonesia.

Tabel 2.1. Tahapan Penghitungan Pengeluaran Riil

Tahap	Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1	Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari data SUSENAS KOR ($=\bar{Y}$)	(Harga berlaku)
2	Menghitung rata-rata pengeluaran perkapita pertahun dalam ribuan ($\bar{Y}_t = \bar{Y} \times \frac{12}{10\ 0\ 0}$)	(Harga berlaku)
3	Menghitung angka riil Y_1 dengan menggunakan IHK (\bar{Y}'_t)	$\bar{Y}'_t = \bar{Y}_t / IHK$ (Harga Konstan)
4	Menghitung indeks “kemahalan” suatu wilayah	
5	Menyesuaikan berdasarkan PPP/unit (\bar{Y}''_t)	$= (\bar{Y}''_t = (\bar{Y}'_t)) / (PPP/unit)$. Langkah ini untuk menjamin nilai rupiah yang standar

Indeks “kemahalan” suatu wilayah dihitung berdasarkan perbandingan kuantitas dan harga antar wilayah dari sejumlah komoditi sebagaimana yang dilakukan oleh *International Comparison Project/ICP* dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Indeks kemahalan diperlukan untuk menstandarkan nilai “beli” rupiah di semua daerah di Indonesia.

Formula PPP

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

P_{ij} : Harga komoditas i di kab/kota j

P_{ik} : Harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : Jumlah komoditas

Langkah berikutnya menghitung pengeluaran perkapita disesuaikan dengan cara:

$$\bar{Y}_t'' = \frac{\bar{Y}_t'}{PPP_j}$$

Keterangan:

\bar{Y}_t'' : Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan

\bar{Y}_t' : Rata-rata pengeluaran perkapita pertahun atas dasar harga konstan 2012

PPP : Paritas daya beli

2.3. Metode Penghitungan IPM

Ukuran umum yang dipakai untuk mengetahui status dan kemajuan pembangunan manusia (UNDP; 1990), adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu (1) hidup sehat dan umur panjang / peluang hidup (*longevity*) yang diwakili oleh angka harapan hidup saat lahir, (2) pendidikan/pengetahuan (*knowledge*)

yang diwakili oleh rata-rata antara harapan lama sekolah penduduk usia dewasa dengan rata-rata lama sekolah dan (3) standar kehidupan layak (*decent living*) yang diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Peluang hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e_0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data SUSENAS. Indikator angka harapan lama sekolah diperoleh dari variabel lama sekolah, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Sedangkan UNDP menggunakan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Tingkat Kesehatan:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

$I_{kesehatan}$: Indeks kesehatan

AHH : Angka harapan hidup

AHH_{min} : Angka harapan hidup minimal

AHH_{max} : Angka harapan hidup maksimal

Tingkat Pengetahuan:

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$I_{pengetahuan}$: Indeks Pengetahuan

I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah

I_{RLS} : Indeks Rata-rata lama sekolah

Untuk mendapatkan nilai $I_{pengetahuan}$ sebelumnya harus dihitung terlebih dahulu nilai-nilai dari I_{HLS} dan I_{RLS} . Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

HLS : Harapan lama sekolah

HLS_{min} : Harapan lama sekolah minimal

RLS_{max} : Harapan lama sekolah maksimal

RLS : Rata-rata lama sekolah

RLS_{min} : Rata-rata lama sekolah minimal

RLS_{max} : Rata-rata lama sekolah maksimal

Harapan Lama sekolah memiliki perhitungan tersendiri dengan rumus umum:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t

FK: Faktor koreksi pesantren

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i: usia (a, a+1,..., n)

koreksi pesantren yang digunakan bertujuan untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas. Sumber data pesantren yaitu dari direktorat pendidikan islam.

Tingkat Pengeluaran:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Setelah diketahui nilai dari masing-masing indikator tersebut, langkah selanjutnya adalah cara menghitung nilai agregasi atau nilai Indeks Pembangunan Manusia dengan rata-rata ukur/ rata-rata geometri.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}}$$

Dalam setiap perhitungan indikator, baik indikator kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran menggunakan nilai maksimum dan minimum tertentu yang telah ditentukan. Pada perhitungan dengan metode baru ini, nilai maksimum dan minimum setiap variable mengacu pada UNDP.

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Batas maksimum dan minimum untuk semua indikator mengacu pada UNDP kecuali untuk indikator pengeluaran/ daya beli. Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua. Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah ke dalam empat golongan/tingkatan status yaitu rendah (kurang dari 60), sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan sangat tinggi (lebih dari sama dengan 80). Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$\text{IPM} < 60$
Sedang	$60 \leq \text{IPM} < 70$
Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
Sangat Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$

2.5. Ukuran Perkembangan IPM

Lebih lanjut, angka IPM suatu daerah menunjukkan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100. Namun dengan metode yang baru untuk mengukur percepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM pertahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Perhitungan pertumbuhan IPM metode baru dilakukan dengan rumus pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun ke-t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun ke-t-1

2.6. Definisi Operasional Indikator Terpilih

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :

Rasio jenis kelamin	Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
Persentase rumah tangga beratap layak	Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dedaunan).
Persentase rumah tangga berdinding permanen	Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding permanen (tembok atau kayu).

Persentase rumah tangga berlantai bukan tanah	Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai bukan tanah.
Persentase rumah tangga bersumber air minum ledeng	Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum ledeng.
Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih	Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa/sumur/mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah/kotoran terdekat.
Persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar berjenis leher angsa	Proporsi rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar berjenis leher angsa .
Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septic	Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septic
Angka Harapan Hidup	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.
Jumlah Penduduk usia sekolah	Banyaknya penduduk usia 7 sampai 24 tahun
Angka Partisipasi Sekolah	Proporsi penduduk yang sedang bersekolah terhadap jumlah penduduk setiap kelompok usia sekolah
Angka Harapan Lama Sekolah	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
Rata – Rata Lama Sekolah	Rata – rata jumlah tahun yang dijalani untuk

menempuh semua jenis pendidikan formal oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas (standard UNDP) yang mana metode sebelumnya usia 15 Tahun keatas. Asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Paritas Daya Beli

Pengeluaran riil perkapita yang telah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan *utilitas marginal*

<https://paserkab.bps.go.id>

BAB 3

GAMBARAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN PASER

Dalam setiap perencanaan pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, pemerintah dituntut mampu memahami dan menggali secara mendalam bagaimana potensi dan tantangan yang dimiliki masyarakatnya, sehingga kebijakan yang diterapkan nantinya akan sangat mendekati keinginan masyarakatnya. Pada bahasan berikut, akan dipaparkan bagaimana potensi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Paser, baik dibidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan.

3.1. Bidang Kependudukan

3.1.1. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun secara absolut terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 262.301 jiwa dan bertambah menjadi 268.261 jiwa pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebesar 2,27 persen.

Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa dari tahun 2012 - 2016 jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini terlihat jelas dari rasio jenis kelamin penduduk yang selalu mengalami peningkatan. Rasio jenis kelamin (RJK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan, dan bila nilai RJK penduduk disuatu wilayah di atas seratus berarti proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Gambaran lebih jelas tentang jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini :

Tabel 3.1.

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin,
dan Pertumbuhan Kabupaten Paser, Tahun 2011 – 2016

Jenis Kelamin	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Laki – Laki	126.217	129.680	132.722	135.925	139.219	142.377
Perempuan	111.566	114.431	117.269	120.250	123.082	125.884
Total	237.783	244.111	249.991	256.175	262.301	268.261
Rasio Jenis Kelamin	113,13	113,33	113,18	113,04	113.11	113.10
Persentase Pertumbuhan	2,63	2,66	2,41	2,47	2,39	2,27

Sumber : BPS Kabupaten Paser (Proyeksi Penduduk pertengahan tahun)

3.1.2. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Paser, persebaran penduduk di Kabupaten Paser secara geografis masih belum merata yang mengakibatkan terjadinya penumpukan penduduk pada wilayah-wilayah tertentu. Ketidakterataan ini tentunya disebabkan beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah potensi wilayah yang dimiliki.

Kecamatan Tanah Grogot merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Rata-rata jumlah jiwa per km² di kecamatan tanah grogot mencapai 207,12. Artinya, dari setiap 1 km wilayah di kecamatan Tanah Grogot dihuni oleh penduduk sekita 207 jiwa. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Tanah Grogot ini disebabkan karena selain sebagai ibukota dari

Kabupaten Paser, kesempatan penduduk untuk memperoleh peluang ekonomi juga lebih besar dibandingkan di kecamatan lainnya. Hal lain yang juga sangat mempengaruhi adalah kelengkapan fasilitas pendukung lainnya seperti sarana sekolah, sarana kesehatan, sarana ekonomi dan sarana lainnya.

Tabel 3.2.
Persebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
Kabupaten Paser, Tahun 2016

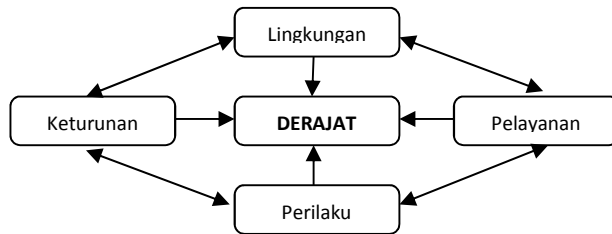
Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya Penduduk		Kepadatan Penduduk
		Jumlah	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Batu Sopang	1.111,38	26.320	9,81	23,68
Muara Samu	855,25	6.096	2,27	7,13
Batu Engau	1.507,26	18.639	6,95	12,37
Tanjung Harapan	714,05	9.778	3,64	13,69
Pasir Belengkong	990,11	27.287	10,17	27,56
Tanah Grogot	335,58	69.505	25,91	207,12
Kuaro	747,30	28.217	10,52	37,76
Long Ikis	1.204,22	39.445	14,70	32,76
Muara Komam	1.753,40	13.919	5,19	7,94
Long Kali	2.385,39	29.055	10,83	12,18

Sumber : BPS Kabupaten Paser (Proyeksi Penduduk Pertengahan Tahun)

3.2. Bidang Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya. Menurut Henrik L Blum, peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu : faktor lingkungan berpengaruh sebesar 45 persen, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen dan kependudukan/keturunan berpengaruh sebesar 5 persen.

Hubungan derajat kesehatan dengan keempat faktornya digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Bagan Henrik L Blum

Berdasarkan bagan di atas, peningkatan pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan merupakan faktor yang sangat memungkinkan untuk diintervensi dengan cepat, dan kontribusinya pun mencapai 65 persen. Sedangkan perubahan perilaku, meskipun dapat diintervensi, namun perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama.

3.2.1. Pelayanan Kesehatan

Kemiskinan seringkali menghambat penduduk miskin untuk dapat mengakses berbagai fasilitas kesehatan. Kebutuhan akan kesehatan sesungguhnya bukan hanya berbicara pada masalah kemampuan rumah tangga dalam membiayai kebutuhan pengobatan saja, akan tetapi juga berbicara pada kemampuan rumah tangga untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

Perlu kita sadari bersama bahwa masih banyak rumah tangga atau penduduk kita yang bertempat tinggal cukup jauh dan sulit dari ketersediaan fasilitas kesehatan, yang mana untuk dapat mencapai fasilitas kesehatan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar dibandingkan dengan pengobatannya.

Namun demikian, pemerintah terus mengupayakan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut dimanapun mereka bertempat tinggal. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Gambaran upaya

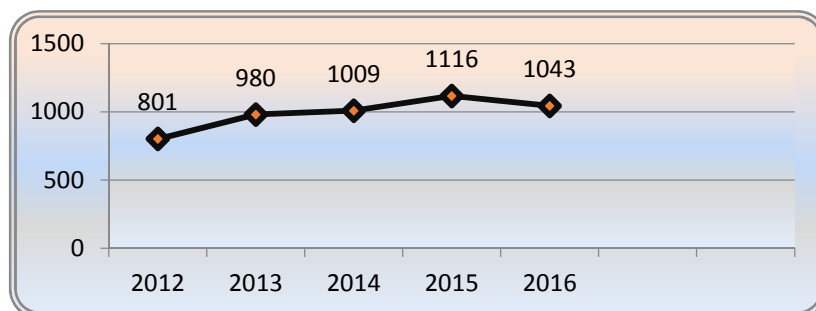
pemerintah dalam rangka meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2016 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.4 dan table 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.3.
Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan menurut Jenisnya
Kabupaten Paser, Tahun 2016

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik / Balai Kesehatan	Polindes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Batu Sopang	0	1	1	17	0	3
Muara Samu	0	1	1	11	0	0
Batu Engau	0	1	1	16	0	3
Tanjung Harapan	0	1	1	8	0	4
Pasir Belengkong	0	1	3	46	0	8
Tanah Grogot	1	1	2	77	0	6
Kuaro	0	2	2	40	0	9
Long Ikis	0	2	3	50	0	17
Muara Komam	0	1	1	27	0	11
Long Kali	0	1	3	54	0	2
Total	1	12	18	346	0	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Grafik 3.1.
Jumlah Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Paser, Tahun 2012 – 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Paser

3.2.2. Kesehatan Lingkungan

Menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antar manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 4 Tahun 1992). Rumah berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga merupakan status lambang sosial (Azwar, 1996; Mukono, 2000).

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif.

Keberadaan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur sangat diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu pengadaan perumahan merupakan tujuan fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan merupakan isu penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial (Krieger and Higgins, 2002).

Kriteria rumah sehat didasarkan pada pedoman teknis penilaian rumah sehat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes RI tahun 2007. Pedoman teknis ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan Kesehatan Perumahan. Sedangkan pembobotan terhadap kelompok komponen rumah, kelompok sarana sanitasi, dan kelompok perilaku didasarkan pada teori Blum, yang diinterpretasikan terhadap bobot komponen rumah (31%), bobot sarana sanitasi (25%), bobot perilaku (44%)

Kelompok Komponen Rumah yang dijadikan dasar penilaian rumah sehat menggunakan Indikator komponen sebagai berikut :

1. Langit-langit
2. Dinding
3. Lantai
4. Jendela kamar tidur
5. Jendela ruang keluarga
6. Ventilasi
7. Lubang asap dapur
8. Pencahayaan
9. Kandang
10. Pemanfaatan Pekarangan
11. Kepadatan penghuni

Indikator sarana sanitasi meliputi :

1. Sarana air bersih
2. Jamban
3. Sarana pembuangan air limbah
4. Sarana pembuangan sampah.

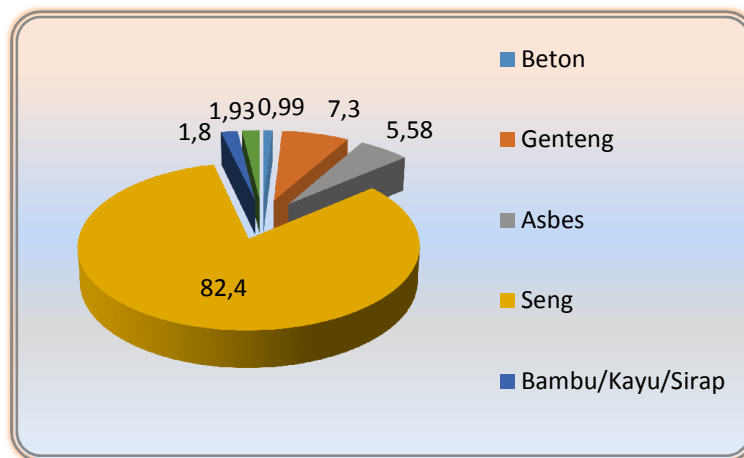
Perilaku penghuni rumah dinilai dengan indikator penilaian yang meliputi :

1. Kebiasaan mencuci tangan
2. Keberadaan vektor tikus
3. Keberadaan Jentik.

Peningkatan indikator komponen rumah dan indikator sarana sanitasi merupakan faktor yang sangat memungkinkan untuk diintervensi dengan cepat, dan kontribusinya mencapai 56 persen. Sedangkan perubahan perilaku, meskipun dapat diintervensi, namun perubahannya memerlukan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan data indikator komponen perumahan Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi antara lain atap, dinding, dan lantai. Menurut jenis atap yang digunakan rumah tangga di Kabupaten Paser tahun 2016 sebagian besar (82,40 persen) terbuat dari seng. Selain seng, jenis atap lain yang digunakan rumah tangga Kabupaten Paser antara lain genteng (7,30 persen), asbes (5,58 persen), Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia (1,93 persen) , bambu/kayu/ sirap (1,80 persen), dan beton (0,99 persen). Berdasarkan uraian tersebut, 96,27 persen rumah tangga di Kabupaten Paser tinggal dalam rumah dengan atap layak atau selain daun dan lainnya.

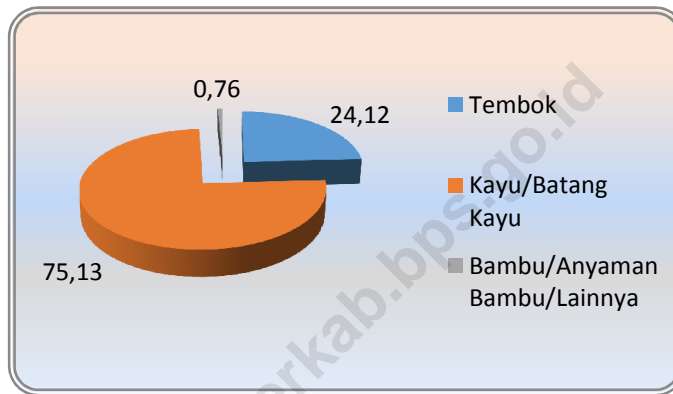
Grafik 3.2.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas
di Kabupaten Paser, Tahun 2016



Sumber : BPS Kabupaten Paser (SUSENAS 2016)

Dinding merupakan sisi luar dari suatu bangunan dan merupakan penyekat dengan bangunan fisik lainnya. Menurut jenis dinding terluas, rumah tangga di Kabupaten Paser tahun 2016 yang tinggal di rumah dengan dinding kayu ada sebanyak 75,13 persen, dinding tembok sebanyak 24,12 persen dan sisanya 0,76 persen tinggal dirumah dengan jenis dinding lainnya yaitu selain kayu dan tembok.

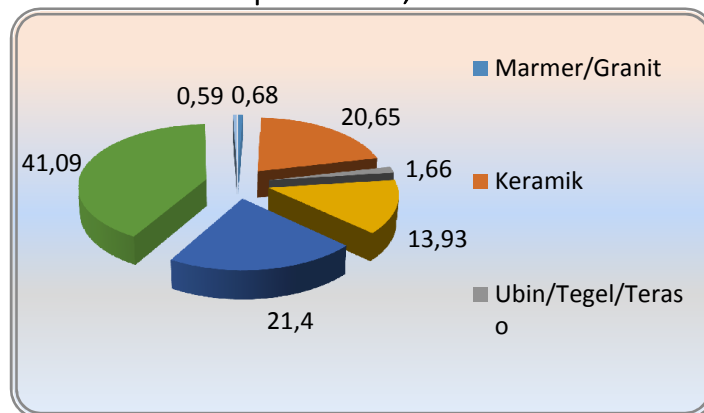
Grafik 3.3.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Paser, Tahun 2016



Sumber : BPS Kabupaten Paser (Susenas 2016)

Jika dilihat dari jenis lantai rumah yang dihuni oleh rumah tangga, 99,41 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan lantai bukan tanah dan hanya sebesar 0,59 persen yang tinggal di lantai berupa tanah.

Grafik 3.4.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Paser, Tahun 2016



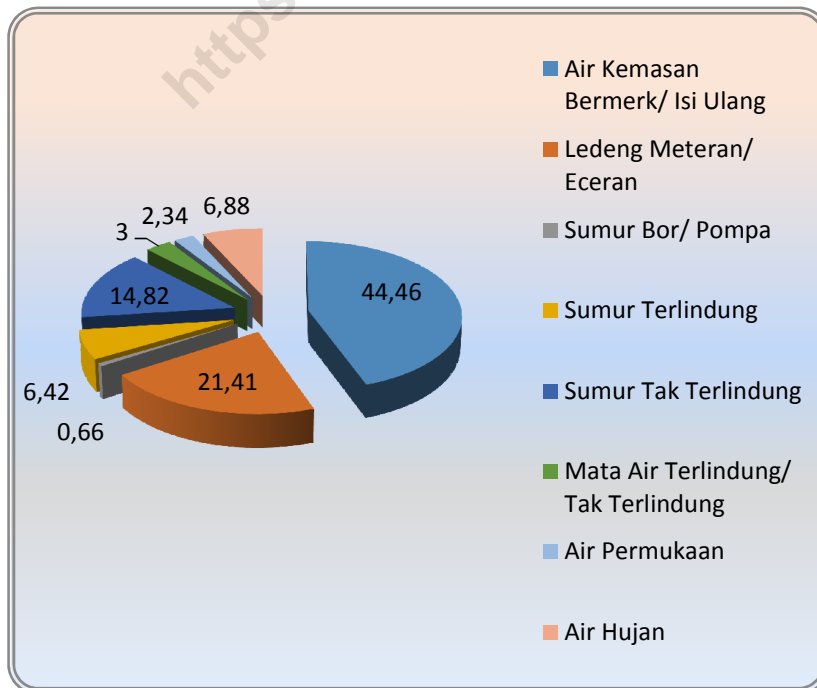
Sumber : BPS Kabupaten Paser (Susenas 2016)

Air merupakan sumber kehidupan manusia, namun dalam hal penggunaannya berbeda-beda begitu juga kualitas maupun kuantitasnya. Air merupakan media penularan penyakit yang paling cepat karena sifatnya yang fleksibel untuk tempat berkembangbiak ataupun penularan berbagai sumber penyakit. Oleh karena itu, menjaga kualitas dan kuantitas air demi terciptanya kesehatan menjadi sangat perlu.

Berdasarkan hasil survei BPS Kabupaten Paser melalui kegiatan SUSENAS Tahun 2016, persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang sebagai sumber air minum cukup tinggi yaitu mencapai 44,46 persen. Hal ini menandakan bahwa, tingkat kesadaran masyarakat terhadap penggunaan air minum dalam rangka menjaga kesehatannya sudah mulai cukup tinggi.

Gambaran penggunaan sumber air minum rumah tangga di Kabupaten Paser pada tahun 2016 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik 3.4 di bawah ini:

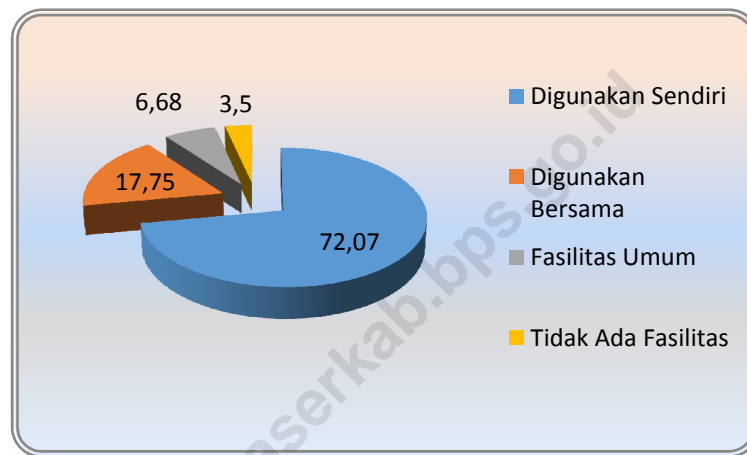
Grafik 3.5.
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum
di Kabupaten Paser, Tahun 2016



Sumber : BPS Kabupaten Paser (susenas 2016)

Bila dilihat dari penggunaan fasilitas air minum oleh rumah tangga, di Kabupaten Paser sebagian besar fasilitas air minum rumah tangga hanya digunakan sendiri 72,07 persen, dan digunakan bersama sebesar 17,75 persen, digunakan secara umum sebesar 6,68 persen dan tidak memiliki fasilitas air minum sebesar 3,50 persen.

Grafik 3.6.
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kabupaten Paser, 2016

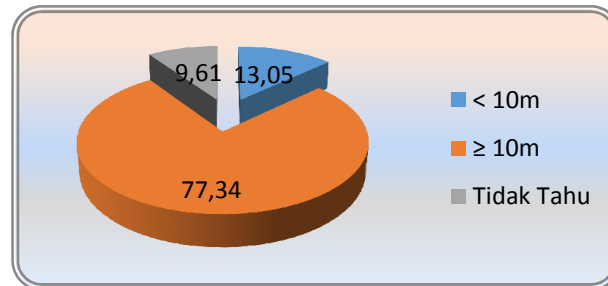


Sumber : BPS Kabupaten Paser (Susenas 2016)

Kualitas air yang berasal dari sumur bor/pompa, sumur, dan mata air akan dipengaruhi oleh jarak dengan penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Jarak yang sehat dengan penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat adalah lebih dari 10 meter (Depkes 1995). Namun berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi BPS Kabupaten Paser tahun 2016, ada sebanyak 13,05 persen rumah tangga yang jarak tempat penampungan akhir (limbah/kotoran/Tinja) ke sumber air yang digunakannya kurang dari 10 meter, dan sebanyak 9,61 persen tidak mengetahui jarak tempat penampungan akhir (limbah/kotoran/Tinja) ke sumber air yang digunakannya.

Gambaran rumah tangga yang mengetahui jarak sumber penggunaan air terhadap pembuangan akhir secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.6 di bawah ini :

Grafik 3.7.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/ Kotoran/ Tinja di Kabupaten Paser, Tahun 2016

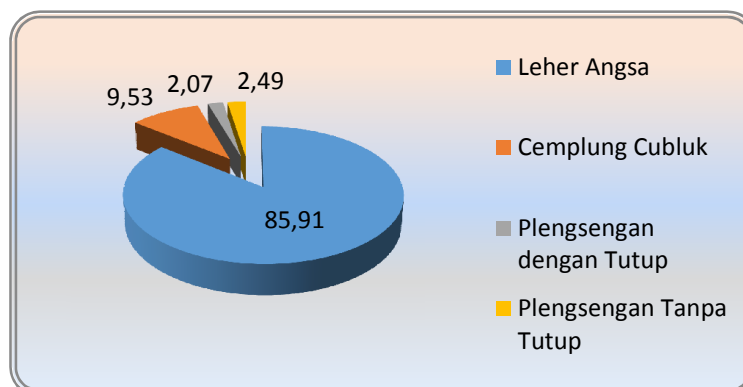


Sumber : BPS Kabupaten Paser (Susenas 2016)

Selain air minum, sanitasi rumah juga perlu mendapat perhatian, agar anggota rumah tangga biasa hidup sehat dan dapat menopang terwujudnya rumah sehat. Salah satu indikatornya adalah jenis kloset yang digunakan. Jenis kloset yang digunakan rumah tangga juga dapat menggambarkan tentang kesehatan lingkungan.

Tahun 2016, berdasar hasil Survei Susenas yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Paser, sebanyak 85,91 persen rumah tangga telah menggunakan kloset leher angsa, 9,53 persen menggunakan cemplung /cubluk, 4,56 persen menggunakan plengsengan.

Grafik 3.8.
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset yang Digunakan di Kabupaten Paser, Tahun 2016



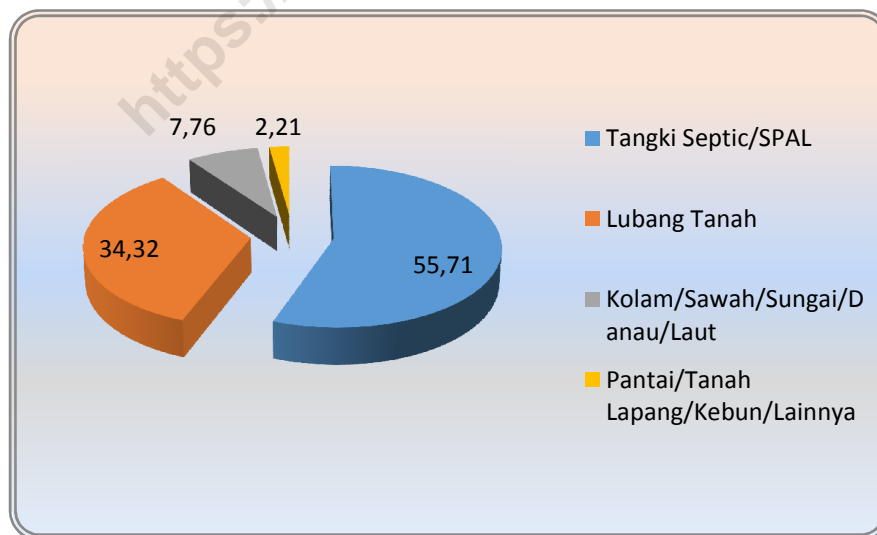
Sumber : BPS Kabupaten Paser (Susenas 2016)

Tempat pembuangan akhir tinja merupakan penunjang sanitasi pada rumah tangga. Tempat pembuangan akhir kotoran / tinja berpengaruh pada kesehatan rumah tangga dan lingkungannya. Tempat pembuangan akhir kotoran/ tinja yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran udara bahkan bisa berdampak pada penyebaran benih penyakit.

Kesadaran masyarakat Kabupaten Paser akan pentingnya masalah sanitasi sudah semakin meningkat dengan tingginya persentase jumlah rumah tangga yang sudah memakai tangki septic/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja yaitu sebesar 55,71 persen, dan 34,32 persen yang memakai lubang tanah.

Gambaran rumah tangga Kabupaten Paser terhadap tempat pembuangan akhir tinja secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik 3.8 di bawah ini :

Grafik 3.9.
Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2016



Sumber : BPS Kabupaten Paser (Susenas 2016)

3.2.3. Derajat Kesehatan

Angka Harapan Hidup saat dilahirkan (AHHo) / Expectation of Life at Birth (e0), Angka Kematian Bayi (AKB) / Infant Mortality Rate (IMR), angka kematian

kasar, dan status gizi, merupakan indikator yang mencerminkan tentang derajat kesehatan masyarakat. Dari indikator-indikator tersebut yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah Angka Harapan Hidup saat dilahirkan (AHHo).

Secara konsepsi, angka harapan hidup diartikan sebagai perkiraan lama hidup penduduk dengan harapan tidak ada perubahan pola mortalitas. Semakin tinggi pencapaian angka harapan hidup di suatu daerah secara tidak langsung dapat menggambarkan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2016, capaian angka harapan hidup penduduk Kabupaten Paser sebesar 72,02 tahun.

Gambaran perkembangan Harapan hidup penduduk Kabupaten Paser tahun 2010-2016 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.3.
Perkembangan Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Paser
Tahun 2010 – 2016

Indikator Derajat Kesehatan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
Angka Harapan Hidup	71,80	71,83	71,85	71,86	71,88	71,98	72,02

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel 3.6 di atas terlihat bahwa, dari tahun ke tahunnya angka harapan hidup penduduk Kabupaten Paser terus mengalami kenaikan. Kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Paser ini seiring dengan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan masyarakat. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya SK Bupati tentang pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas se-Kabupaten Paser dan terus digalakkannya sosialisasi program tersebut di desa-desa.

3.3. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Telah disadari bersama, pendidikan memiliki arti penting bagi upaya meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, proses pendidikan yang baik sesungguhnya adalah upaya sadar individu atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Berbekal pendidikan yang cukup, setiap individu dituntut dengan kemampuannya sendiri dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup secara lebih layak. Dalam konteks ini, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

3.3.1. Fasilitas Pendidikan

Kemajuan dunia pendidikan pada suatu wilayah tidak lepas dari campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan adalah penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan beserta dengan fasilitasnya.

Perhatian pemerintah Kabupaten Paser dalam hal memajukan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Paser sudah sangat terasa, tidak saja dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan tetapi juga dalam hal penyediaan tenaga pengajar yang dari tahun ke tahunnya selalu ditingkatkan kemampuannya serta dengan pemberian biaya oprasional lainnya.

Perkembangan kemajuan fasilitas pendidikan di Kabupaten Paser tahun 2016 dari segi jumlah sekolah, jumlah guru dan murid dapat secara lebih jelas dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.6.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser
Menurut Jenjang Pendidikan , Tahun 2016

	SD/MI/SDLB	SLTP/MTs/SMPLB	SLTA/MA
Sekolah	234	89	42
Murid	35.050	14.192	10.767
Guru	2.547	1.061	848
Rasio Murid Sekolah	149,79	159,46	256,36
Rasio Murid Guru	13,76	13,38	12,70

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

3.3.2. Partisipasi Pendidikan Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah berpartisipasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Di Kabupaten Paser, nilai APS untuk usia 7 – 12 dan usia 13 - 15 tahun menunjukkan persentase angka paling besar dibandingkan dua kelompok jenjang pendidikan lainnya. Tingginya angka partisipasi sekolah pada dua jenjang kelompok umur pendidikan di atas sejalan dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan untuk dua kelompok umur lainnya, rendahnya angka partisipasi sekolah yang dicapai mungkin lebih disebabkan pada faktor kemampuan ekonomi rumah tangga di dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anggota rumah tangganya dan keterbatasan sarana pendidikan pada jenjang pendidikan kelompok umur tersebut yang mampu menjangkau sampai pada wilayah-wilayah terpencil.

Gambaran lebih jelas tentang Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.7
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Paser
Menurut Kelompok Umur Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 – 2016

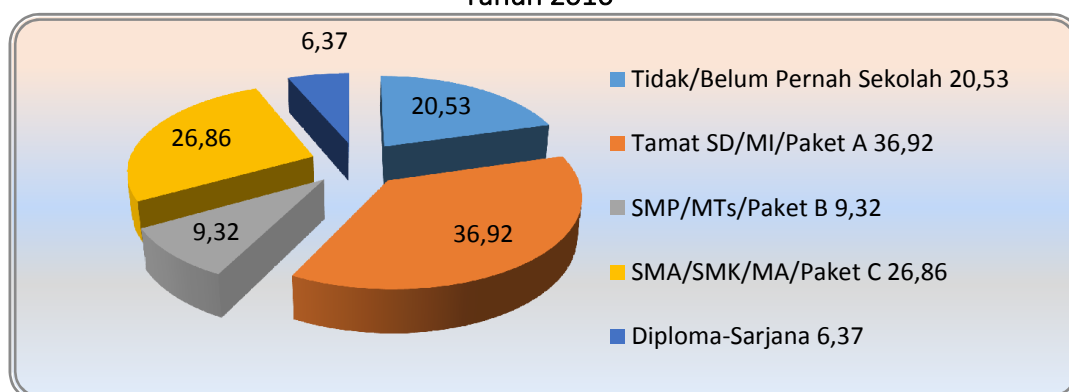
Usia Sekolah	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2010 - 2016						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7 – 12	96,38	97,15	98,09	99,09	99,49	98,98	100,00
13 – 15	85,30	91,85	98,75	97,12	99,40	96,53	95,78
16 – 18	65,52	66,84	65,09	69,62	73,97	82,23	82,33

Sumber : BPS Kabupaten Paser (Susenas 2016)

3.3.3. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Selama lima tahun terakhir peningkatan pendidikan penduduk umur 10 tahun ke atas ditandai dengan menurunnya persentase penduduk berpendidikan rendah kemudian diikuti dengan meningkatnya persentase penduduk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada Tahun 2016 Persentase penduduk Kabupaten Paser umur 10 tahun ke atas yang berpendidikan rendah (SD ke bawah) masih cukup besar (57,45 persen), walau sebagian besar diantaranya adalah penduduk dewasa dan tua.

Grafik 3.10.
Persentase Penduduk Kabupaten Paser Usia 10 Tahun Ke Atas
Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan,
Tahun 2016



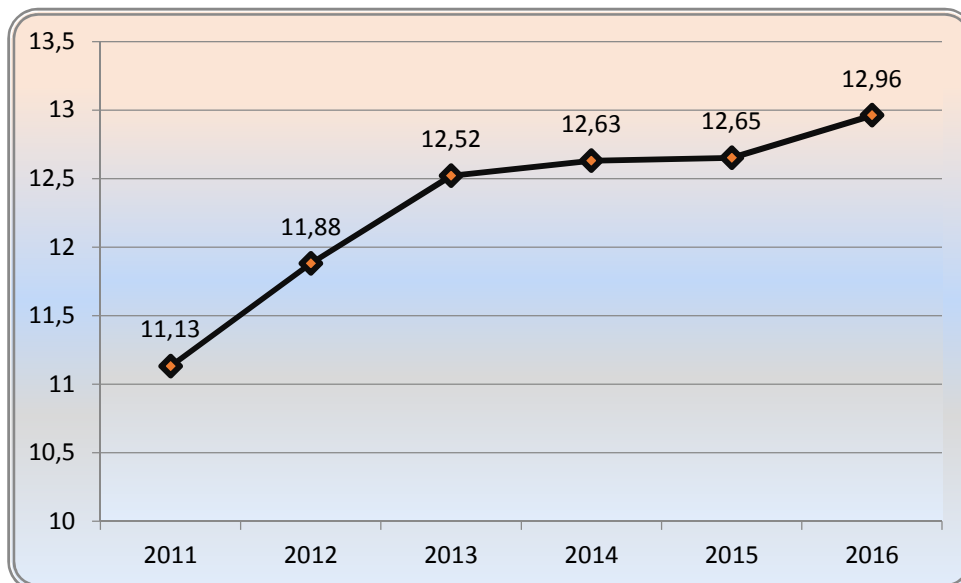
Sumber : BPS Kabupaten Paser

3.3.4. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang semenjak lahir. Pada metode sebelumnya, HLS tidak dipergunakan dan masih menggunakan variabel angka melek huruf. Namun angka melek huruf sering dipertanyakan sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah Indonesia. Sehingga BPS mengganti ukuran melek huruf dengan ukuran harapan lama sekolah. Alasan penggantian tersebut ialah mengikuti standar UNDP. UNDP telah menggunakan metode baru sejak tahun 2010 dan disempurnakan tahun 2011. Selain itu angka melek huruf sudah sangat tinggi untuk semua wilayah. Secara substansial RLS yang merupakan indikator dampak diakui lebih unggul dari APS yang merupakan indikator proses sebagai komponen IPM. Karena alasan itu BPS tetap menggunakan RLS sebagai komponen IPM. Sumber data yang digunakan untuk menghitung HLS dan RLS adalah SUSENAS 2016 KOR.

Grafik 3.11.

Angka Harapan Lama Sekolah
Penduduk di Kabupaten Paser, 2010 – 2015



Sumber : BPS Kabupaten Paser

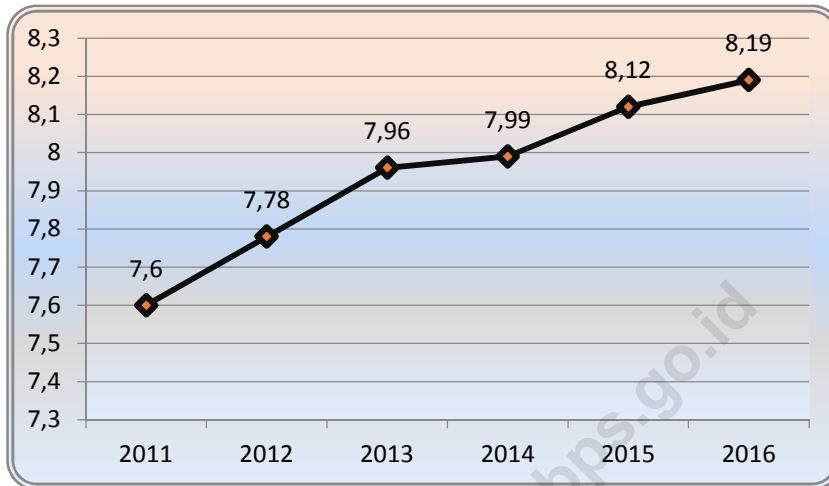
3.3.5. Rata – Rata Lama Sekolah

Terbatasnya anggaran pendidikan dari pemerintah seringkali menjadi dilema, target pencapaian rata-rata lama bersekolah penduduk harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua rumah tangga mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga pendidikan tinggi, semakin mahalnya biaya sekolah menyebabkan sebagian orangtua terpaksa memutuskan kelangsungan sekolah anak-anaknya dan diarahkan membantu ekonomi keluarga.

Fenomena ini sangat disadari oleh pemerintah, dengan menerapkan berbagai strategi agar anak-anak putus sekolah tidak kehilangan harapan meraih pendidikan tinggi, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran di bidang pendidikan baik melalui APBD maupun APBN. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakatnya. Pengguliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS) diharapkan mampu mencegah anak-anak rawan Drop Out (DO) tidak melanjutkan sekolah.

Menurut data Susenas 2016, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Paser mencapai 8,19 tahun artinya mereka rata – rata telah bersekolah sampai tingkat SLTP hampir kelas 9 selama 2 bulan. Laju peningkatan rata-rata lama sekolah yang cenderung lambat mengindikasikan bahwa program intervensi langsung pemerintah untuk mempertahankan anak-anak tetap bersekolah belum terlihat memiliki daya ungkit yang nyata terhadap pencapaian rata-rata lama sekolah. Hal ini lebih disebabkan karena beban ekonomi keluarga mengakibatkan para orang tua tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalokasikan pendapatannya bagi pengeluaran pendidikan anak-anaknya, walaupun mendapat keringanan biaya sekolah, namun kebutuhan pembiayaan sekolah lainnya juga dirasa masih cukup tinggi.

Grafik 3.12.
Rata – Rata Lama Sekolah Penduduk 25 Tahun Ke Atas
di Kabupaten Paser, 2011 – 2016

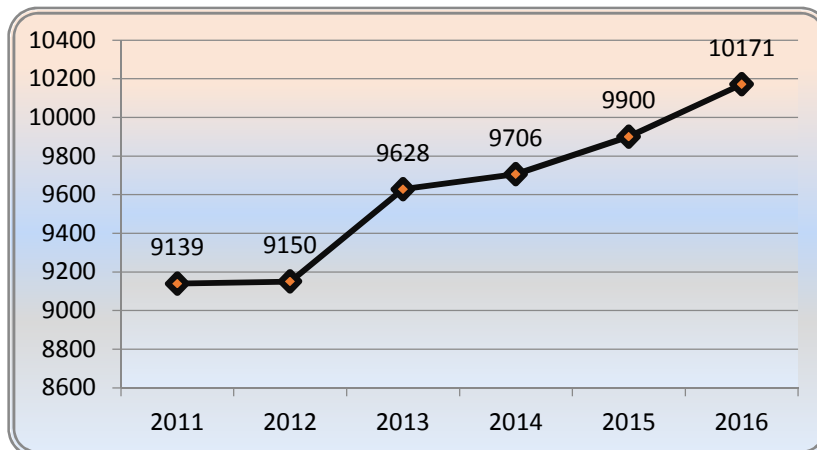


Sumber : BPS Kabupaten Paser

3.4. Pengeluaran Perkapita Per Tahun

Peningkatan pencapaian angka IPM Kabupaten Paser pada tahun 2016 ditunjang oleh kontribusi dari komponen pengeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan.

Grafik 3.13.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Per tahun yang disesuaikan (000)
Kabupaten Paser Tahun 2011 – 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Paser pada tahun 2016 naik pada kisaran Rp.10.171.000,- per tahun atau sekitar Rp. 848.000,- per bulan. Agar laju pertumbuhan pengeluaran perkapita meningkat pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat, seperti pembukaan kesempatan kerja baru dan penyiapan program ketahanan pangan yang berkelanjutan.

<https://paserkab.bps.go.id>

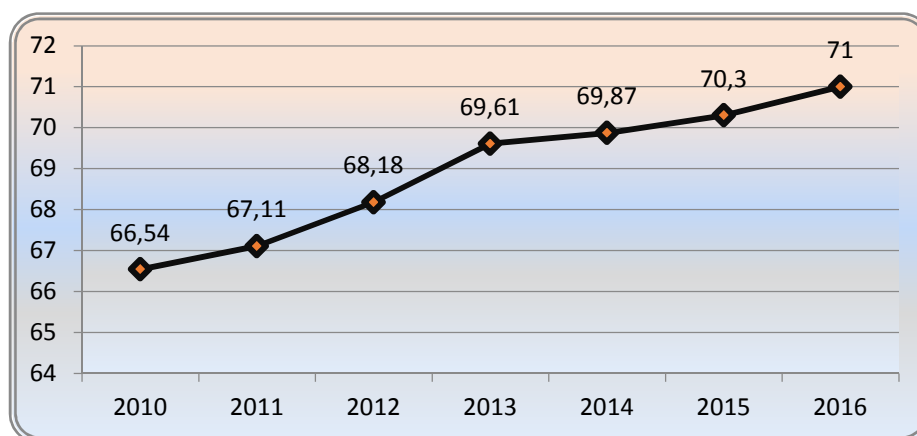
BAB 4

TREND INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PASER

Sesuai dengan fungsinya sebagai suatu indikator, IPM dihitung untuk melihat perbandingan antar wilayah atau antar daerah. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi relatif pembangunan manusia disuatu wilayah dibandingkan wilayah lainnya. Untuk itu, dengan membandingkan besaran IPM Kabupaten Paser dengan IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diperoleh gambaran mengenai posisi relatif pembangunan manusia di Kabupaten Paser.

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Paser pada kurun waktu 2010 – 2016, dengan metode perhitungan baru cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016, IPM Kabupaten Paser sebesar 71,00 dan menduduki peringkat ke 7 se-Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia Kabupaten Paser berada dalam status tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Grafik 4.1.
Perkembangan IPM Kabupaten Paser
Tahun 2010–2016

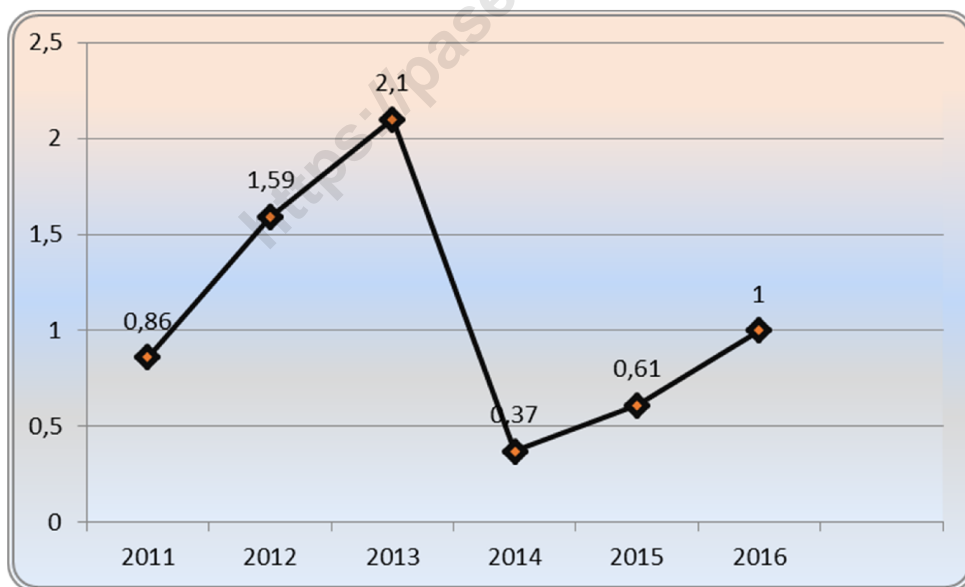


Sumber : BPS Kabupaten Paser

Untuk melihat tingkat kelajuan peningkatan IPM dalam suatu periode pada wilayah tertentu dapat dilihat dari angka pertumbuhan IPM yang dihasilkan. Angka ini menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Dari tahun 2015 ke 2016 pertumbuhan IPM Kabupaten Paser naik menjadi 1 persen dari periode sebelumnya yang hanya 0,61 persen. Dalam 6 tahun terakhir pertumbuhan IPM paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,1 persen sedangkan Pertumbuhan IPM Kabupaten Paser terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya mencapai 0,37 persen.

Grafik 4.2.
Pertumbuhan IPM Kabupaten Paser
Tahun 2011 - 2016



Sumber : BPS Kabupaten Paser

<https://paserkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel. 1.
Share Kelompok Komoditas dalam Perhitungan
Paritas Daya Beli (PPP)

No	Kelompok	Share kelompok	Terpilih	
			Share	Jumlah item
	Makanan	47,29	39,82	66
1	Padi-padian	8,02	7,89	2
2	Umbi-umbian	0,42	0,23	2
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,3	7
4	Daging	2,06	1,69	3
5	Telur dan susu	2,76	2,37	4
6	Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
7	Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
8	Buah-buahan	2,21	1,22	7
9	Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
10	Bahan minuman	1,64	1,47	3
11	Bumbu-bumbuan	0,95	0,4	3
12	Konsumsi lainnya	1	0,61	1
13	Makanan dan minuman jadi	11,8	10,94	19
14	Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
	Non makanan	52,71	33,81	30
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
2	Aneka barang dan jasa	18,79	13,5	12
3	Pakaian, alas kaki,tutup kepala	3,76	3,35	4
4	Barang tahan lama	6,15	1,22	4
5	Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0	0
6	Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0	0
	Total	100	73,63	96

Tabel. 2.

Komoditas Terpilih pada Metode Baru
dalam Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

M a k a n a n		N o n M a k a n a n	
Beras	Pepaya	Rumah sendiri/bebas sewa	
Tepung terigu	Minyak kelapa	Rumah kontrak	
Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya	Rumah sewa	
Kentang	Kelapa	Rumah dinas	
Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir	Listrik	
Kembung	Teh	Air PAM	
Bandeng	Kopi	LPG	
Mujair	Garam	Minyak tanah	
Mas	Kecap	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)	
Lele	Penyedap masakan/vetsin	Perlengkapan mandi	
Ikan segar lainnya	Mie instan	Barang kecantikan	
Daging sapi	Roti manis/roti lainnya	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut	
Daging ayam ras	Kue kering	Sabun cuci	
Daging ayam kampung	Kue basah	Biaya RS Pemerintah	
Telur ayam ras	Makanan gorengan	Biaya RS Swasta	
Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak	Puskesmas/pustu	
Susu bubuk	Nasi campur/rames	Praktek dokter/poliklinik	
Susu bubuk bayi	Nasi goreng	SPP	
Bayam	Nasi putih	Bensin	
Kangkung	Lontong/ketupat sayur	Transportasi/pengangkutan umum	
Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Pos dan Telekomunikasi	
Bawang merah	Sate/tongseng	Pakaian jadi laki-laki dewasa	
Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi perempuan dewasa	
Cabe merah	Makanan ringan anak	Pakaian jadi anak-anak	
Cabe rawit	Ikang (goreng/bakar dll)	Alas kaki	
Tahu	Ayam/daging (goreng dll)	Minyak Pelumas	
Tempe	Makanan jadi lainnya	Meubelair	
Jeruk	Air kemasan galon	Peralatan Rumah Tangga	
Mangga	Minuman jadi lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga	
Salak	Es lainnya	Alat-alat Dapur/Makan	
Pisang ambon	Roko kretek filter		
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter		
Pisang lainnya	Rokok putih		

Tabel. 3.
Angka Harapan Hidup Kabupaten / Kota
Propinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 - 2016

Kode	Prov/Kab/Kota	Agak Harapan Hidup (Tahun)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6400	KALIMANTAN TIMUR	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62	73.65	73,68
6401	Paser	71,80	71,83	71,85	71,86	71,88	71.98	72,02
6402	Kutai Barat	71,74	71,82	71,90	71,96	72,03	72.19	72,28
6403	Kutai	71,41	71,44	71,46	71,48	71,50	71.60	71,64
6404	Kutai Timur	72,08	72,16	72,23	72,30	72,37	72.39	72,45
6405	Berau	70,99	71,05	71,10	71,15	71,21	71.31	71,37
6409	Penajam Paser Utara	70,28	70,34	70,40	70,43	70,48	70.53	70,80
6411	Mahakam Ulu	70,83	70,91	70,98	71,05	71,12	71.13	71,19
6471	Kota Balikpapan	73,90	73,91	73,92	73,93	73,94	73.95	73,96
6472	Kota Samarinda	73,49	73,53	73,56	73,59	73,63	73.65	73,68
6474	Kota Bontang	73,63	73,65	73,66	73,67	73,68	73.69	73,71

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel. 4.
 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten / Kota
 Propinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2010 – 2016

Kode	Prov/Kab/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6400	KALIMANTAN TIMUR	11,87	12,06	12,46	12,85	13,17	13.18	13,35
6401	Paser	10,91	11,13	11,88	12,52	12,63	12.65	12,96
6402	Kutai Barat	11,01	11,54	11,57	11,58	12,14	12.30	12,75
6403	Kutai	11,59	11,79	12,11	12,96	13,24	13.25	13,26
6404	Kutai Timur	11,01	11,30	11,59	12,12	12,42	12.43	12,44
6405	Berau	11,36	12,02	12,06	12,86	12,96	13.17	13,18
6409	Penajam Paser Utara	11,26	11,32	11,39	11,45	11,69	12.02	12,46
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	11,82	11,87	12.03	12,42
6471	Kota Balikpapan	12,07	12,27	12,47	13,15	13,43	13.46	13,59
6472	Kota Samarinda	13,07	13,52	13,64	13,76	14,16	14.17	14,23
6474	Kota Bontang	11,80	11,94	12,12	12,50	12,68	12.77	12,79

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel. 5.
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten / Kota
Propinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 – 2016

Kode	Prov/Kab/Kota	MYS(Rata-rata Lama Sekolah) (Tahun)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6400	KALIMANTAN TIMUR	8,56	8,79	8,83	8,87	9,04	9.15	9,24
6401	Paser	7,48	7,60	7,78	7,96	7,99	8.12	8,19
6402	Kutai Barat	7,26	7,46	7,53	7,89	7,98	8.02	8,03
6403	Kutai	7,68	8,13	8,35	8,41	8,46	8.68	8,71
6404	Kutai Timur	7,92	8,12	8,39	8,56	8,60	8.69	8,72
6405	Berau	7,91	8,25	8,34	8,52	8,53	8.62	8,78
6409	Penajam Paser Utara	6,87	7,07	7,09	7,30	7,46	7.59	7,60
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	6,86	7,15	7.36	7,37
6471	Kota Balikpapan	10,02	10,16	10,29	10,39	10,41	10.44	10,54
6472	Kota Samarinda	9,42	9,97	10,00	10,20	10,26	10.31	10,33
6474	Kota Bontang	10,21	10,22	10,28	10,34	10,35	10.38	10,39

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel. 6.
Pegeluaran perkapita per tahun yang disesuaikan
Kabupaten / Kota Propinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 – 2015

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran perkapita per tahun yang di sesuaikan (000 Rp)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6400	KALIMANTAN TIMUR	10.790	10.927	10.944	10.981	11.019	11 229	11.355
6401	Paser	9.004	9.139	9.150	9.628	9.706	9 900	10.171
6402	Kutai Barat	8.632	8.746	8.801	9.228	9.262	9 380	9.492
6403	Kutai	9.063	9.263	9.281	9.866	9.984	10 250	10.593
6404	Kutai Timur	8.652	8.801	9.049	9.297	9.484	9 704	9.960
6405	Berau	10.913	11.002	11.188	11.375	11.471	11 572	11.675
6409	Penajam Paser Utara	9.874	10.069	10.199	10.773	10.807	10 913	11.019
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	7.036	7.071	7 162	7.281
6471	Kota Balikpapan	12.813	12.922	13.127	13.333	13.439	13 705	13.883
6472	Kota Samarinda	13.061	13.128	13.292	13.455	13.538	13 825	14.010
6474	Kota Bontang	15.096	15.271	15.318	15.820	15.878	15 980	16.157

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel. 7.
 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota
 Propinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2010 – 2016

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6400	KALIMANTAN TIMUR	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17	74,59
6401	Paser	66,54	67,11	68,18	69,61	69,87	70,30	71,00
6402	Kutai Barat	65,90	66,92	67,14	68,13	68,91	69,34	69,99
6403	Kutai	67,45	68,47	69,12	70,71	71,20	71,78	72,19
6404	Kutai Timur	66,94	67,73	68,71	69,79	70,39	70,76	71,10
6405	Berau	69,16	70,43	70,77	72,02	72,26	72,72	73,05
6409	Penajam Paser Utara	66,37	66,92	67,17	68,07	68,60	69,26	69,96
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	63,81	64,32	64,89	65,51
6471	Kota Balikpapan	75,55	76,02	76,56	77,53	77,93	78,18	78,57
6472	Kota Samarinda	75,85	77,05	77,34	77,84	78,39	78,69	78,91
6474	Kota Bontang	76,97	77,25	77,55	78,34	78,58	78,78	78,92

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel. 8.
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten / Kota
Propinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010 – 2016

Kode	Prov/Kab/Kota	Rank IPM						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6400	KALIMANTAN TIMUR	3	3	3	3	3	3	3
6401	Paser	7	7	7	7	7	7	7
6402	Kutai Barat	9	9	9	8	8	8	8
6403	Kutai	5	5	5	5	5	5	5
6404	Kutai Timur	6	6	6	6	6	6	6
6405	Berau	4	4	4	4	4	4	4
6409	Penajam Paser Utara	8	8	8	9	9	9	9
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	10	10	10	10
6471	Kota Balikpapan	3	3	3	3	3	3	3
6472	Kota Samarinda	2	2	2	2	2	2	2
6474	Kota Bontang	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

Tabel. 9.
 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota
 Propinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2011 – 2016

Kode	Prov/Kab/Kota	Pertumbuhan IPM (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6400	KALIMANTAN TIMUR	1,01	0,82	0,81	0,83	0,62	0,57
6401	Paser	0,86	1,59	2,10	0,37	0,62	1,00
6402	Kutai Barat	1,55	0,34	1,47	1,15	0,83	0,94
6403	Kutai	1,51	0,94	2,31	0,68	0,52	0,57
6404	Kutai Timur	1,18	1,43	1,57	0,87	0,64	0,48
6405	Berau	1,83	0,48	1,77	0,33	0,95	0,45
6409	Penajam Paser Utara	0,83	0,37	1,34	0,78	0,88	1,01
6411	Mahakam Ulu	-	-	-	0,80	0,33	0,96
6471	Kota Balikpapan	0,63	0,71	1,26	0,52	0,38	0,50
6472	Kota Samarinda	1,58	0,38	0,65	0,70	0,25	0,28
6474	Kota Bontang	0,36	0,39	1,02	0,30	0,62	0,18

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

JL. Gejah Mada No.76 Tana Paser Telp./Fax. 0543-21219
E-mail : bas6401@bas.go.id Website <http://osserkeb.bas.go.id>